

ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PULAU JAWA DAN SUMATERA

Idna Hadi^{1*}, Husnul Khotimah²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi, Jakarta, Indonesia

idnahadi@gmail.com^{1*}, husnulhotimah@trilogi.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Pulau Jawa dan Sumatera yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan antara Pulau Jawa dan Sumatera. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran masing-masing provinsi tahun 2015-2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan Uji T dengan menggunakan SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja keuangan provinsi Pulau Jawa dilihat dari rasio kemandirian tergolong sedang sedangkan Pulau Sumatera tergolong rendah. Kinerja keuangan provinsi Pulau Jawa dilihat dari rasio Efektivitas tergolong sangat efektif sedangkan Pulau Sumatera tergolong efektif. Kinerja keuangan provinsi Pulau Jawa dilihat dari rasio efisiensi tergolong tidak efisien sedangkan Pulau Sumatera tergolong tidak efisien. Berdasarkan Uji Statistik Independent Sample T-test adanya perbedaan yang signifikan pada rasio kemandirian dan tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata baik pada rasio efektivitas maupun pada rasio efisiensi. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa masih perlunya dilakukan upaya peningkatan kinerja pada provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera agar tujuan dibentuknya otonomi daerah dapat tercapai.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan; Rasio Efektivitas; Rasio Efisiensi; Rasio Kemandirian

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the financial performance of regional governments in the provinces of Java and Sumatra using regional financial ratios. The goal of this research is to compare the financial performance of the islands of Java and Sumatra from 2015 to 2019. The study method employed was descriptive quantitative. The data used is from each province's Budget Realization Report for 2015-2019. Documentation is the method utilized to acquire data. In this study, the T-test was used to evaluate hypotheses using SPSS 26. The findings of this study show that: The financial performance of the Java Island province, as measured by the independence ratio, is moderate whereas Sumatra Island's is poor. The province of Java is categorized as extremely effective, whereas Sumatra Island is classified as effective. The financial performance of Java Island is classed as inefficient by the efficiency ratio, whereas Sumatra Island is labeled as inefficient. The independence ratio is significantly different, the average efficiency ratio and the efficiency ratio are not significantly different, according to the Independent Sample T-test. The results of the study indicate that it is still necessary to make

efforts to improve performance in the provinces in Java and Sumatra so that the goal of establishing regional autonomy can be achieved.

Keywords: *effectiveness ratio; efficiency ratio; financial performance; independence ratio*

Histori artikel:



Diunggah: 10-10-2022

Direview: 27-10-2022

Diterima: 14-11-2022

Dipublikasikan: 01-12-2022

* Penulis korespondensi 

PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia telah berjalan selama 26 tahun. Tujuan dibentuknya sistem ekonomi daerah adalah agar daerah mampu mengembangkan potensi ekonominya sendiri sehingga dapat mencapai tingkat kemandirian secara fiskal. Meski begitu, filosofi dari tujuan otonomi daerah dinilai belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, selama kurun waktu 26 tahun ini, terdapat beberapa daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bawah 20 persen dan menggantungkan keuangannya pada pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bersama pemerintah pusat dan daerah agar kewenangan yang diberikan dapat mencapai hasil sesuai tujuannya.

Suatu daerah otonom harus mampu mengelola keuangan daerahnya baik penerimaan maupun pengeluaran, di mana penerimaan yang diperoleh daerah kemudian dialokasikan sebagai pembiayaan dan belanja daerahnya. Artinya agar suatu daerah mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi sepenuhnya maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya menjadi basis utama pendapatan daerah dibandingkan dengan dana transfer dari pusat dan provinsi. Kemampuan suatu daerah dalam menjalankan roda pemerintahan terletak pada kemampuan keuangan daerah, yang artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri (Desita et al., 2015). Untuk mewujudkan kemampuan daerah tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan yang persentasenya lebih kecil kepada Pemerintah Pusat sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan Pemda.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah yang mencerminkan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Namun demikian, pada kenyataannya banyak daerah yang masih tergantung pada dana transfer dari pusat karena minimalnya PAD. Fenomena ini perlu dikaji, karena jika berdasarkan data yang ada, potensi ekonomi yang dimiliki daerah untuk mengembangkan PAD masih cukup besar, namun potensi-potensi tersebut belum dapat digali dengan baik (djpk.depkeu.go.id). Hal tersebut menjadikan dimensi keuangan daerah otonom yang paling krusial untuk diteliti adalah kemandirian keuangan daerah otonom kabupaten/kota.

Rasio kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Kartika & Kusuma, 2015). Selain rasio kemandirian, terdapat rasio lain adalah rasio efektivitas. Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Dalam mengukur kinerja pemerintah daerah rasio efektivitas saja tidak cukup, oleh karena itu dihitung rasio efisiensi PAD karena rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah (Mardiasmo, 2013).

Rasio efisiensi juga menggambarkan perbandingan antara besarnya belanja untuk memperoleh penerimaan dengan realisasi penerimaan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang

dicapai kurang dari satu atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi, berarti kinerja Pemerintah Daerah semakin baik.

Banyak peneliti terdahulu yang meneliti variabel terkait, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Fiskal & Suseno, 2013) menggunakan metode analisis rasio dengan teknik analisis kualitatif deskriptif. Variable yang digunakan hanya variabel rasio efektivitas dan kemandirian, dengan hasil rasio efektivitas masuk dalam katagori sangat efektif dan rasio kemandirian dapat dikategorikan cukup bagus. Penelitian yang dilakukan (Kartika & Kusuma, 2015) memperoleh hasil bahwa kemandirian keuangan Kabupaten Sukabumi dari tahun 2009 sampai 2013 tergolong sangat rendah dengan menunjukkan pola hubungan instruktif. Penelitian yang dilakukan (Lazyra, 2016) menggunakan metode analisis ratio dengan teknik deskriptif kuantitatif dan menggunakan variabel rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan penduduk dengan hasil kinerja pemerintah daerah kota Medan dengan menggunakan rasio keuangan daerah mengalami penurunan. Untuk penelitian kinerja keuangan di beberapa provinsi telah dilakukan oleh (Marshela & Khotimah, 2021) yang meneliti efektivitas dan efisiensi keenam provinsi di pulau Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kinerja keuangan di provinsi pulau Jawa telah efektif dan efisien.

Penelitian ini menggunakan objek pemerintah daerah tidak hanya di Provinsi pulau Jawa tetapi juga di pulau Sumatera, karena menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kedua pulau tersebut mendominasi struktur perekonomian di Indonesia dan memiliki banyak pemerintah provinsi dalam masing-masing pulau, di mana Pulau Jawa memiliki 6 provinsi dan Pulau Sumatera memiliki 10 provinsi. Dengan melihat tingkat kinerja keuangan pemerintah pada kedua pulau tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana tingkat kinerja sesungguhnya pemerintah daerah setelah menjalankan otonomi. Selanjutnya penelitian ini juga meneliti perbedaan kinerja antara kedua pulau untuk memberikan gambaran apakah terdapat perbedaan rata-rata antara pulau yang paling mendominasi struktur perekonomian Indonesia yaitu pulau Jawa dengan pulau yang memiliki jumlah provinsi terbanyak yaitu pulau Sumatera. Penelitian sebelumnya hanya meneliti kinerja keuangan pada satu pemerintah daerah (provinsi/kabupaten) sedangkan penelitian ini menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan pada semua provinsi di pulau Jawa dan Sumatera.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 (menggantikan UU 32 tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah, arti dari “otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sementara itu Otonomi daerah secara harfiah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan nomos. Autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan atau undang-undang. Sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan, daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Keuangan Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Siklus pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah) serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Analisis Rasio Keuangan

Salah satu cara yang dilakukan dalam mengukur kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangannya adalah menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah (Halim, 2012). Analisis ratio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan yang bersumber dari APBD antara lain:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dengan jumlah transfer pemerintah pusat tambah propinsi tambah pinjaman. Rasio kemandirian menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Kartika & Kusuma, 2015). Kinerja pemerintah daerah dikatakan semakin baik jika tingkat kemandirian mendekati 100% (delegatif). Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut (Mahmudi, 2010 dalam Kartika & Kusuma, 2015) :

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah dalam menggunakan rasio kemandirian keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

sumber : Halim (2004) dalam (Zukhri, 2020) 880448300164984

b. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas keuangan daerah otonom (selanjutnya disebut “Rasio EKD”) menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal (Halim, 2002 dalam (Kartika & Kusuma, 2015). Kinerja keuangan daerah semakin efektif jika mendekati angka rasio 100%. Rumus menghitung efektivitas daerah otonom diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas keuangan daerah dalam menggunakan rasio efektivitas keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Sangat efektif	>100
Efektif	100-90
Cukup efektif	90-80
Kurang efektif	80-60
Tidak efektif	60-0

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327,1996

c. Rasio Efisiensi

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria efisiensi keuangan daerah dalam menggunakan rasio efisiensi keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kemampuan Keuangan	Rasio Efisiensi (%)
Sangat efisien	Kurang dari 60
Efisien	60-80
Cukup efisien	80-90
Kurang efisien	90-100
Tidak efisien	Di atas 100

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam dalam (Susanto, 2019)

Selain menganalisis rasio keuangan pemerintah daerah provinsi di pulau Jawa dan Sumatera, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan pemerintah provinsi di pulau Jawa dengan pulau Sumatera. Pulau Jawa merupakan antara pulau yang paling mendominasi struktur perekonomian Indonesia (58,7%) sedangkan pulau Sumatera menduduki peringkat kedua dengan perbedaan persentase yang cukup signifikan (21,54%) tetapi memiliki jumlah provinsi terbanyak yaitu 10 provinsi. Dengan perbedaan karakteristik dari kedua pulau tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kinerja keuangan di Pulau Jawa dengan Sumatera.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah pemerintah provinsi Pulau Jawa dan Sumatera dengan data penelitian yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2015-2019 yang didapat dari laman resmi masing-masing provinsi dan laman resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif.

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan *Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 26*. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian (Sugiyono, 2017: 147). Analisis ini akan diuji terlebih dahulu menggunakan uji asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesa. Uji asumsi yang digunakan adalah Uji Normalitas. Selanjutnya dilakukan pengujian beda rata-rata (Uji -T) untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan antara provinsi Pulau Jawa dan Sumatera.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 4. Statistik Deskriptif Rasio Kemandirian, Efektivitas dan Efisiensi Provinsi Pulau Jawa dan Sumatera Tahun 2015-2019

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
Rasio Kemandirian	16	0,17	0,71	0,4481	0,14270
Rasio Efektivitas	16	0,90	1,08	0,9881	0,05102
Rasio Efisiensi	16	0,08	1,11	0,9256	0,23312

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26 (2021)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata rasio kemandirian adalah 0,4481 termasuk dalam kategori rendah dan pola hubungan konsultatif. Sedangkan rasio efektivitas bernilai rata-rata 0,9881 termasuk dalam kategori efektif dan rasio efisiensi memiliki rata-rata 0,9256 termasuk dalam kategori kurang efisien.

Rasio Kemandirian

Tabel 5. Perbandingan Rata-rata Rasio Kemandirian antara Provinsi Pulau Jawa dengan Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2015-2019

Provinsi di:	N	Minimum	Maximum	Mean
Pulau Jawa	6	0,40	0,71	0,5883
Pulau Sumatera	10	0,17	0,47	0,3640
Total	16	0,17	0,71	0,4481

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26 (2021)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui perbandingan rasio kemandirian Pemerintah Provinsi Jawa lebih baik dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera. Kinerja keuangan provinsi Jawa dilihat dari rasio kemandirian mempunyai nilai maksimum sebesar 0,71 atau 71% yang diperoleh pada provinsi DI Yogyakarta. Hal ini kemungkinan disebabkan karena tatanan pemerintahannya yang menganut sistem desentralisasi asimetris yang tetap memegang erat nilai-

nilai kerajaan. Nilai rata-rata rasio kemandirian pulau Jawa sebesar 58,83 atau 58,83% yang tergolong sedang dengan menunjukkan pola hubungan partisipatif sedangkan kinerja keuangan provinsi Pulau Sumatera dilihat dari rasio kemandirian mempunyai nilai maksimum sebesar 0,47 atau 47% yang diperoleh pada provinsi Sumatera Utara dan nilai minimum rasio kemandirian sebesar 0,17 atau 17% yang diperoleh pada provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini kemungkinan disebabkan karena provinsi Aceh masih dalam tahap membangun pasca terjadinya pemberontakan dan bencana alam beberapa tahun silam. Nilai rata-rata rasio kemandirian provinsi Pulau Sumatera sebesar 0,3640 atau 36,40% yang tergolong rendah dengan menunjukkan pola hubungan konsultatif.

Rasio Efektivitas

Tabel 6. Perbandingan Rata-rata Rasio Efektivitas antara Provinsi Pulau Jawa dengan Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2015-2019

Provinsi di:	N	Minimum	Maximum	Mean
Pulau Jawa	6	0,95	1,08	1,0133
Pulau Sumatera	10	0,90	1,04	0,9730
Total	16	0,90	1,08	0,9881

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26 (2021)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui perbandingan rasio efektivitas provinsi Pulau Jawa lebih baik dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera. Provinsi Pulau Jawa mempunyai nilai minimum sebesar 0,95 atau 95% yang diperoleh pada provinsi DKI Jakarta dan nilai maksimum 1,08 atau 107,85% yang diperoleh pada provinsi Jawa Timur. Nilai rata-rata rasio efektivitas provinsi Pulau Jawa sebesar 1,0133 atau 101,36% dengan kriteria sangat efektif sedangkan kinerja keuangan provinsi Pulau Sumatera dilihat dari rasio efektivitas mempunyai nilai minimum sebesar 0,90% atau 90% yang diperoleh pada provinsi Lampung dan nilai maksimum 1,04% atau 103,93% yang diperoleh pada provinsi Jambi. Nilai rata-rata rasio efektivitas provinsi Pulau Sumatera sebesar 0,9730 atau 97% dengan kriteria efektif.

Rasio Efisiensi

Tabel 7. Perbandingan Rata-rata Rasio Efisiensi antara Provinsi Pulau Jawa dengan Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2015-2019

Provinsi di:	N	Minimum	Maximum	Mean
Pulau Jawa	6	0,86	1,02	0,9667
Pulau Sumatera	10	0,86	1,11	1,0010
Total	16	0,86	1,11	0,9881

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26 (2021)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui perbandingan rasio efisiensi provinsi Pulau Jawa mempunyai nilai maksimum sebesar 1,02 atau 102% yang diperoleh pada provinsi Banten dan nilai minimum 0,86 atau 86% yang diperoleh pada provinsi Jawa Tengah. Nilai rata-rata rasio efisiensi provinsi Pulau Jawa sebesar 0,9667 atau 96,67% dengan kriteria kurang efisien sedangkan kinerja keuangan provinsi Pulau Sumatera sebesar 1,0010 atau 100,10% dengan kriteria tidak efisien. Nilai maksimum provinsi Pulau Sumatera sebesar 1,11 atau 110,82% yang

diperoleh pada provinsi Riau dan nilai minimum 0,86% atau 86% yang diperoleh pada provinsi Sumatera Selatan.

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan setelah data diuji normalitasnya dan memperoleh hasil bahwa data telah terdistribusi secara normal. Pengujian hipotesis bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata rasio keuangan antara pemerintah daerah di Provinsi Jawa dan Sumatera:

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

Rasio	Sig (2 tailed)	Keterangan
Kemandirian	0,000	Signifikan
Efektivitas	0,130	Tidak signifikan
Efisiensi	0,603	Tidak Signifikan

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26 (2021)

Berdasarkan Uji t-Test pada tabel 8 didapatkan skor signifikan sebagai berikut :

1. Rasio kemandirian : 0,000 ($< 0,05$) artinya terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata rasio kemandirian di pulau Jawa dengan pulau Sumatera. Tingkat kemandirian pemerintah daerah provinsi di pulau Jawa lebih baik dan berbeda secara nyata dibandingkan dengan tingkat kemandirian pemerintah daerah provinsi di pulau Sumatera.
2. Rasio efektivitas : 0,130 ($> 0,05$) artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata rasio efektivitas pulau Jawa dengan pulau Sumatera.
3. Rasio efisiensi : 0,603 ($> 0,05$) artinya tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata rasio efisiensi di pulau Jawa dengan pulau Sumatera. Tingkat kemandirian pemerintah daerah provinsi di pulau Jawa tidak berbeda secara nyata dibandingkan dengan tingkat kemandirian pemerintah daerah provinsi di pulau Sumatera walaupun rata-rata kriteria kedua pulau tersebut adalah Tidak Efisien.

Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Provinsi di Pulau Jawa lebih baik dari pada provinsi di pulau Sumatera. Hal ini dapat disebabkan karena Pulau Jawa mendominasi struktur perekonomian di Indonesia. Investasi dan pembangunan masih banyak yang terpusat di Pulau Jawa dibandingkan Pulau Sumatera, sehingga peluang provinsi di Pulau Jawa untuk menaikkan kinerja keuangannya sangat besar. Sumber daya baik dari sisi teknologi, infrastruktur dan sumber daya manusia relatif mudah diperoleh oleh pemerintah daerah di Pulau Jawa dibandingkan pemerintah Daerah di Pulau Sumatera. Hasil ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Marshela & Khotimah, 2021) yang menyatakan bahwa pengelolaan anggaran di provinsi pulau Jawa secara umum telah efektif walaupun belum optimal. Hasil penelitian ini juga tidak jauh berbeda dengan hasil yang didapat oleh (Lazyra, 2016) yang menemukan bahwa pemerintah di kota Medan (salah satu provinsi di Pulau Sumatera) kurang efisien dan mandiri.

Bagaimanapun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di kedua Provinsi masih harus ditingkatkan lagi terutama dalam hal kemandirian dan efisiensi penggunaan anggaran. Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah bahwa perlunya meningkatkan kinerja keuangan di pemerintah daerah pulau Jawa dan Sumatera. Sebagai pemerintah di dua pulau terpadat penduduknya, seharusnya

kinerja keuangan di kedua pemerintah provinsi tersebut dapat lebih optimal karena didukung dengan sarana, pra sarana dan sumber daya manusia yang memadai dibandingkan pulau lainnya di Indonesia..

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian pemerintah daerah provinsi di Pulau Jawa lebih baik (sedang/partisipatif) dibanding Pulau Sumatera (rendah/konsultatif). Efektivitas pemerintah daerah provinsi di kedua pulau sama-sama dalam tingkat yang efektif sedangkan tingkat efisiensi kedua Pulau sama-sama tidak efisien. Hasil ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan kedua Pulau masih belum optimal dan perlu ditingkatkan lagi agar tujuan dibentuknya otonomi daerah dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Desita, P. N., Kirmizi, & Ali, A. A. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Pekanbaru (2010-2014). *Jom FEKON*, 2(2), 1–13. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/8209>
- Fiskal, D., & Suseno, D. A. (2013). Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasca Diterapkannya Desentralisasi Fiskal. *Economics Development Analysis Journal*, 2(2).
- Kartika, D., & Kusuma, I. C. (2015). Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Akunida*, 1(2), 23–33.
- Lazyra, K. (2016). Analisis rasio keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan pemerintah kota medan. *Skripsi Program Studi Akuntansi*, 1–63.
- Marshela, T. D., & Khotimah, H. (2021). ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KINERJA PEMERINTAH (STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI PULAU JAWA). *TRILOGI ACCOUNTING & BUSINESS RESEARCH*, 02(02), 148–156.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143–149. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213>